

## Wajah Politik Muhammadiyah Oleh: Adil Mubarak

### ABSTRACT

*Muhammadiyah is known as community organization based on religious principle which act on disseminating Islamic values in order to reform Islamic principle to become purely. In its growth, Muhammadiyah does not far away from political activities that is not really its field. Various roles in political context are played by Muhammadiyah both external an internal space. This article's aim is describing relationship pattern between Muhammadiyah and political field to reinforce Muhammadiyah actual face in politic.*

**Keywords :** *Muhammadiyah, politic, community organization*

Membicarakan Muhammadiyah tidak akan pernah habisnya, Organisasi besutan KH.Ahmad Dahlan yang berdiri tahun 1912, tepatnya tanggal 18 November (8 Zulhijah 1330 H) tersebut sampai detik ini masih saja menjadi “buah bibir” berbagai kalangan mulai dari elit penguasa sampai masyarakat yang berada di akar rumput. Tidak saja di dalam Negeri, Muhammadiyah menjadi perhatian juga dalam skala dunia internasional. Komentar dan penilaian yang mengapung dipermukaan itupun sangat beragam tergantung dari perspektif mana kalangan tersebut melihatnya.

Keberagaman komentar dan penilaian yang muncul itu tentu tidak tanpa dasar, semuanya muncul karena memang Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang mempunyai banyak wajah. Dari jauh Muhammadiyah tampak doktriner, tetapi dari dekat terlihat terdapat sedikit sistematisasi teologi, yang menunjukkan adanya susunan ajaran moral yang diambil langsung dari Al-Quran dan Hadits. Dari luar Muhammadiyah tampak eksklusif, tetapi jika berada di dalam sangat terbuka. Dari segi organisasi tampak membebani, namun Muhammadiyah sebenarnya sangat menghargai pengabdian pribadi. Muhammadiyah tampak sebagai organisasi yang sangat disiplin, tetapi

sebenarnya tidak ada alat pendisiplinan yang efektif selain kesadaran para anggotanya. Muhammadiyah tampak agresif dan fanatik, namun sesungguhnya cara penyiarannya berlangsung perlahan-lahan dan toleran. Muhammadiyah juga tampak anti jawa, tetapi sebenarnya dalam banyak hal mewujudkan sifat orang Jawa.<sup>1</sup>

Banyak wajah Muhammadiyah lainnya juga pernah dirumuskan oleh peneliti lainnya Alfian (1989: 5) menemukan tiga wajah Muhammadiyah sebagai gerakan Pembaharu Islam di Indonesia, bahwa Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditinjau dari tiga segi yakni sebagai *a religious reformist, agent of social changes*, dan *a political force* yaitu sebagai gerakan pembaharu keagamaan Muhammadiyah tampil dalam gerakan pemurnian Islam, sebagai agen perubahan sosial, Muhammadiyah telah banyak melakukan modernisasi sosial lewat pendidikan dan sebagai kekuatan politik Muhammadiyah dengan sangat cakap memerankan dirinya

---

<sup>1</sup> Haedar Nashir. 2000. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing

sebagai kelompok kepentingan.<sup>2</sup> Dua wajah yang pertama berasal dari posisi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan dan wajah yang ketiga merupakan peran Muhammadiyah sebagai salah satu kelompok kepentingan (*Interest group*).

Tulisan ini sebenarnya akan mendeskripsikan wajah ketiga dari tiga wajah yang di gambarkan oleh Alfian diatas tadi yaitu Muhammadiyah dalam konteks sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang memiliki peran politik yang harus diperhitungkan oleh kekuatan-ketuan politik lain di Negara ini. Muhammadiyah memang bukan partai politik namun Muhammadiyah memiliki posisi sangat penting dan strategis dalam dinamika politik Nasional.

Sejarah menjadi bukti yang jelas terkait sepak terjang Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan Nasional, sejak awal periodisasi keberadaan Negara Indonesia tidak satupun momen politik penting yang dilewatkan oleh Muhammadiyah, mulai dari masa perjuangan, masa persiapan kemerdekaan, era orde lama, masa orde baru sampai saat ini di era reformasi.

Sebut saja misalnya beberapa moment politik utama yang selalu menjadi sorotan adalah antara lain pemilihan umum (pemilu) baik untuk legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pendirian Partai politik, sampai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung di berbagai daerah di tanah air Muhammadiyah tetap saja memiliki “saham” untuk harus terlibat baik langsung maupun tidak langsung terjun ke arena yang sebenarnya bukan lahan sesungguhnya

bagi sebuah perserikatan berbasis keagamaan ini.

Tidak saja secara organisatoris, secara pribadi banyak tokoh-tokoh dan kader Muhammadiyah yang secara terang-terangan memiliki aktifitas politik. Menyebarnya para kader Muhammadiyah ke beberapa partai politik yang ada di Indonesia menjadikan Muhammadiyah secara organisasi mampu membangun relasi politik yang “menggurita” dan tentu ini menjadi satu kekuatan politik yang kongrit bagi Muhammadiyah untuk terus menjadi organisasi sosial yang punya peran politik yang sangat kuat.

Perkembangan politik nasional saat ini misalnya, terutama pasca pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 dan akhirnya terpilih kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden yang dilantik pada 20 Oktober 2009 kemudian di ikuti dengan bergagai kasus semacam “cicak Buaya”(KPK versus Polri), kasus Bank Century, Korupsi para elit politik, dan sebagainya itu menjadikan Muhammadiyah yang dipimpin saat ini oleh Bapak Din Syamsudin cenderung mengambil posisi berseberangan dan kritis. Sikap kritis Muhammadiyah terhadap pemerintah saat ini yang tentu di mulai dari beberapa fenomena politik yang tegang adalah merupakan bentuk peran Muhammadiyah akhir-akhir ini yang menandakan bahwa di bidang politik Muhammadiyah tetap saja menjadi primadona yang selalu menjadi bahan “gunjingan” dari berbagai kalangan.

Sebagai sebuah organisasi yang memiliki jaringan begitu luas dan solid sampai ketinggian desa (ranting) Muhammadiyah juga banyak berbuat dalam konteks politik daerah. Pemilu Kepala Daerah dan Pemilu Legislatif tingkat lokal menjadi ruang politik yang hampir tak terlewatkan oleh Muhammadiyah daerah. Pemberitaan

---

<sup>2</sup> Alfian. 1989. Muhammadiyah The Political Behavior of Amuslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

paling hangat yang tersebar di media misalnya terkait majunya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Drs. Dasril Ilyas menjadi Calon Legislatif melalui Partai Amanat Nasional (Padang Ekspres, Senin:11-02-2013) membuktikan betapa Muhammadiyah tidak akan melewatkan Momen tersebut. Hal ini memunculkan asumsi bahwa Muhammadiyah merasa perlu untuk memperbanyak investasi politiknya demi kemajuan organisasi dimasa yang akan datang.

Beberapa gambaran diatas tadi adalah akhirnya muncul satu pemikiran untuk mencoba melihat wajah politik Muhammadiyah secara lebih jelas dalam rangka mendudukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya masih sangat simpang siur terkait Muhammadiyah dan politik tersebut. Bagaimana kedudukan Muhammadiyah dalam hubungannya dengan politik ?, dan peran seperti apa yang dilakoni oleh Muhammadiyah dalam konteks politik?. Ini merupakan pertanyaan besar yang hendak di jawab dalam tulisan yang singkat ini.

#### **A. Pembahasan**

##### **1. Khittah Muhammadiyah Tentang Politik**

Konsep Khittah dalam Muhammadiyah sudah dikenal lama yakni sejak Muktamar di Palembang tahun 1956. Khittah merupakan garis perjuangan Muhammadiyah yang berisikan pokok-pokok pemikiran dengan sebuah proses perumusan mendalam dimana hasilnya akan menjadi keputusan yang akan dijadikan garis perjuangan atau garis kebijakan organisasi kemudian harus di implementasi secara konsisten oleh semua kader dalam membesarkan perserikatan.

Secara historis Muhammadiyah untuk pertamakalinya memperkenalkan konsep khittah dimulai pada Muktamar ke-33 tahun 1956 di Palembang.

Karenaya sering di namakan sebagai “Khittah Palembang”. Adapun kandungan penting dari Khittah Muhammadiyah tahun 1956 tersebut mengandung tujuh langkah pokok yaitu: (1) Menjiwai pribadi para anggota terutama para Pimpinan Muhammadiyah, (2) Melaksanakan uswatun Hasanah, (3) Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi, (4) Memperbanyak dan mempertinggi pintu amal, (5) Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader, (6) Mempercepat Uhkuwah dan (7) Menuntut penghidupan anggota.<sup>3</sup>

Kemudian ditahun-tahun berikutnya bermunculan beberapa Khittah Muhammadiyah yang juga menghasilkan beberapa pokok pemikiran penting bagi gerak Muhammadiyah selanjutnya, adapun beberapa Khittah Muhammadiyah yang lahir setelah Khittah Palembang adalah Khittah Ponorogo di tahun 1969, Khittah Ujung Pandang tahun 1971, dan Khittah Denpasar tahun 2002. Semua periodisasi Khittah yang lahir ini memiliki latar belakang kelahiran sesuai dengan situasi dan kondisi internal maupun eksternal Muhammadiyah serta memiliki penekanan-penekatan khusus terhadap isu yang sedang di bicarakan oleh organisasi ini.

Dari ke empat khittah yang telah di gambarkan di atas maka ada satu Khittah Muhammadiyah yang sangat erat sekali hubungan dengan masalah politik. Khittah ini juga sering dikenal sebagai Khittah Politik karena pokok pikiran dan keputusan yang dilahirkan oleh Khittah ini akhirnya menjadi sebuah mekanisme dan ketentuan yang kuat dalam mengatur Muhammadiyah dengan politik. Khittah yang dimaksud adalah Khittah Ujung Pandang tahun 1971.

---

<sup>3</sup> Haerdar Nashir. 2008. Khittah Muhammadiyah Tentang Politik. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah

Khittah ini menjadi Khittah yang paling populer dari beberapa Khittah yang ada, dan sekaligus khittah UjungPandang inilah yang paling banyak di rujuk dan menjadi pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi menghadapi dunia politik.<sup>4</sup> Adapun isi dari Khittah UjungPandang tersebut esesnsinya mengandung dua garis perjuangan Muhammadiyah sebagai berikut :

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu Partai Politik atau Organisasi Apapun.
2. Setiap Anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak azasnya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perserikatan Muhammadiyah.

Dari 2 garis perjuangan Muhammadiyah ini jelas sekali bahwa sejak itu Muhammadiyah menjadi organisasi yang netral, dimana sebelumnya memang secara organisasi Muhammadiyah masih terkait dengan keberadaan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Secara organisatoris tidak ada lagi keberpihakan terhadap partai politik, Muhammadiyah tidak akan berafiliasi dengan Partai Politik Manapun. Tetapi dengan catatan bahwa para anggota Muhammadiyah bebas untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Parpol manapun yang tidak merugikan Muhammadiyah secara khusus dan merugikan Islam secara Umum.

Wujud sikap netral Muhammadiyah tersebut oleh M. Din

Syamsudin (1995) disebut dengan istilah “Politik Alokatif” yaitu bahwa aktifitas Politik Muhammadiyah diupayakan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu didalam kerangka ideologi Negara yaitu menanamkan prinsip-prinsip Islam kedalam proses pembangunan berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup>

Penerapan “politik alokatif” dalam perilaku politik Muhammadiyah berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi serta elit pemimpinnya. Misalnya dibawah Kepemimpinan KH.AR. Fachruddin (1971-1990) dan KH. Ahmad Azhar Basyir (1990-1994) dalam menjalankan Khittah Ujungpandang tampak hati-hati dan flamboyan dengan menonjolkan prinsip *amar ma`ruf nahi mungkar* yaitu mengajak untuk berbuat baik dan mencegah untuk berbuat buruk, hal ini di tenggarai karena situasi dan kondisi politik orde baru yang tidak menguntungkan bagi dunia Islam.

Situasi mulai berubah ketika M.Amin Rais terpilih menjadi Ketua PP Muhammadiyah tahun 1995 di Banda aceh, dilandasi oleh *High politics* (politik tinggi atau politik adiluhung) dimana Muhammadiyah menunjukkan keberanian dan ketegasannya dalam melakukan kritik terhadap penguasa pada waktu itu, yang pada ujungnya mendorong Muhammadiyah untuk memelopori bangkitnya pergerakan reformasi yang di komandoi langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Amin Rais. Dan begitu seterusnya disetiap perodesasi Kepemimpinan Muhammadiyah memiliki kecenderungan dalam beraktivitas yang berhubungan dengan politik secara individual namun mewarnai perilaku Muhammadiyah secara institutional hingga saat ini.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Suwarno. 2002 . Muhammadiyah Sebagai Oposisi . Yogyakarta : UII Press

<sup>6</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

Namun apapun kegiatan dan sepak terjang yang dilakukan oleh para Pimpinan Muhammadiyah serta kadernya yang berhubungan dengan politik praktis tentu akan mempedomani Khittah perjuangannya di bidang politik tadi, dengan konsekuensi ketika para pimpinan yang ingin aktif di politik praktis yaitu Partai Politik sesuai dengan Khittah juga maka mereka harus melepaskan Baju Kepemimpinan Muhammadiyahnya, namun bagi para kader dan simpatisan Muhammadiyah dipersilahkan untuk terus berjuang di ranah politik sesuai etika politik yang telah di gariskan oleh Perserikatan.

Catatan terakhir dari Khittah Perjuangan inilah yang pada akhirnya hingga saat ini menjadikan Muhammadiyah sangat dekat dengan politik karena kader Muhammadiyah menyebar secara merata di lini-lini politik Nasional dalam rangka memajukan bangsa dan Negara serta sudah tentu dalam upaya mengembangkan perjuangan Organisasi yaitu Muhammadiyah.

#### I. Pola Hubungan Muhammadiyah dan Politik

Haedar Nashir : 2000 menjelaskan beberapa pola hubungan Muhammadiyah dan politik yaitu ; (1) Hubungan formal dan Langsung. Hubungan Muhammadiyah dan politik yang bersifat formal artinya Muhammadiyah secara organisasi terlibat langsung dalam partai politik. Adapun hubungan yang bersifat langsung artinya Muhammadiyah terlibat secara aktif dan kongret dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan yang sering disebut perjuangan politik Praktis.

Dalam perjalanan sejarah yang panjang, pola hubungan formal dan langsung dengan politik ini pernah di lalui oleh Muhammadiyah dimana beberapa kali Muhammadiyah terlibat

dalam partai politik, ikut membidani kelahirannya, bahkan menjadi kekuatan intinya yakni : MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia), PII (Partai Islam Indonesia), Masyumi ( Majlis Syura Muslimin Indonesia ), Parmusi ( Partai Muslim Indonesia), Sekber Golkar dan yang terakhir adalah Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>7</sup>

Pola hubungan Muhammadiyah dan Politik yang kedua (2) Hubungan personal dan tidak langsung. Ini ditandai oleh keterlibatan aktif tokoh-tokoh puncak (elit pimpinan) Muhammadiyah yang memperoleh dukungan luas dari anggota Muhammadiyah dalam membidani kelahiran dan mendukung keberadaan partai politik tertentu.

Amin Rais misalnya, sebagai salah satu lokomotif reformasi adalah sosok intelektual-pejuang yang gigih menggulirkan ide perlunya suksesi kepemimpinan nasional. Amin Rais juga menjadi figure sentral PAN yang pada waktu itu langsung menjadi ketua Umum PAN menjadi sosok kontemporer yang membuktikan pola hubungan personal antara Muhammadiyah dan Politik tersebut.<sup>8</sup> Tentu masih banyak lagi kader Muhammadiyah yang menjadi figure utama dalam peristiwa-peristiwa politik Nasional hingga saat ini yang tidak bisa diuraikan secara panjang dalam artikel ini.

Pola Hubungan yang ketiga (3) adalah Netral yaitu hubungan Muhammadiyah dengan politik menjadi lebih tegas ketika organisasi Islam ini mengambil kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan

<sup>7</sup> Sudarno Shobron. 2003. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional. Surakarta : Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>8</sup> A.M. Fatwa 2000. dalam Muhammadiyah "DIGUGAT" Reposisi di Tengah Indonesia Yang Berubah. Editor : Nur Achmad & Pramono U. Tanthowi. Jakarta : Harian Kompas.

segenap kekuatan politik manapun dalam azas netralitas.

Adapun jika Muhammadiyah ingin memerankan posisi politiknya tidak lebih pada konsep yang disebut dengan politik nilai yang murni yaitu Muhammadiyah menebarkan politik yang berpihak kepada kebenaran Islam dengan melakukan aktifitas politik hanya untuk mempraksiskan nilai-nilai Islam sehingga bisa menjadi contoh bagi elit Politik lainnya di Indonesia. *Konsep uswatun hasanah* dalam khasanah Islam, yang merupakan perilaku Rasulullah, merupakan konsep sentral yang terus diterjemahkan oleh elit politik Muhammadiyah.<sup>9</sup> Ini artinya dalam konteks politik praktis Muhammadiyah benar-benar tidak menjadi poros utama, sehingga yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam konteks politik adalah pengedepanan moral politik dalam upaya menyelaraskan fungsi utama Muhammadiyah sebagai Ormas Islam yang berusaha untuk memposisikan dirinya pada posisi yang seharusnya.

Itulah tiga pola hubungan Muhammadiyah dengan politik yang dapatkan menggambarkan lebih jelas sketsa wajah Muhammadiyah dalam konteks politik. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang juga dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang non-politik dalam kenyataan sosiologis yang dilaluinya terlibat pula dalam pergumulan politik.

Hal ini terjadi karena Muhammadiyah dalam kompleksitas perjuangannya, keluasan amal usahanya dan bidang gerakannya secara otomatis memiliki sejuta kepentingan demi kemajuan visi, misi, dan tujuan yang hendak di capai secara efektif. Dalam posisi ini Muhammadiyah bisa juga di

kategorikan sebagai kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan adalah kelompok yang ingin selalu mempertahankan dan membela kepentingan mereka, dalam literature politik *interest group* lazim dinisbahkan kepada kelompok, asosiasi atau perhimpunan profesi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan kelompoknya.<sup>10</sup>

Maka, sebagai kelompok kepentingan Muhammadiyah tentu akan melakukan kegiatan-kegiatan politik langsung yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Karena menurut sarjana politik lainnya kelompok kepentingan juga dapat diartikan yaitu setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama berkehendak memperoleh jabatan publik.<sup>11</sup>

Dengan pandangan yang terakhir ini wajah politik Muhammadiyah semakin jelas terbentuk, bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah berjarak begitu tegas dengan politik ketika organisasi ini memiliki begitu banyak kepentingan-kepentingan yang mesti diselamatkan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan itulah Muhammadiyah baik secara organisasi maupun personal (kader) akan selalu menjadi actor utama dalam kaitannya dengan politik khususnya di pentas politik Nasional.

Namun apapun itu dalam memamerkan wajah politiknya agar tidak bernoda maka Muhammadiyah harus

---

<sup>9</sup> Fajlurrhman Jurdi. 2007. Aib Politik Muhammadiyah. Yogyakarta : JUXTAPOSE

---

<sup>10</sup> Maurice Duverger. 1981. Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan (terjemahan). Yogyakarta: Bina Aksara.

<sup>11</sup> Gabriel Almond . 1990. Kelompok Kepentingan dan Partai Politik, dalam Mohtar Mas'ode & Colin MacAndrews: Perbandingan Politik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press

selalu tampil dengan “bedak” yang tadi disebut dengan Khittah politik Muhammadiyah sehingga aktivitas dan kegiatan Muhammadiyah yang berhubungan dengan politik tidak lari dari aturan main yang berlaku demi menjaga keperibadian Muhammadiyah sebagai organisasi islam yang berjuang untuk pemurnian Islam sesuai keinginan K.H Ahmad Dahlan pendirinya dengan sebuah pesan hidup-hidupilah Muhammadiyah tetapi jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah.

## **II. Penutup**

Muhammadiyah dan politik hampir bisa dipastikan tidak akan terpisahkan apalagi jika memposisikan Muhammadiyah sebagai sebuah kelompok kepentingan yang memiliki berjuta kepentingan dan kepentingan itu harus diselamatkan dengan berbagai macam cara yang tentu sifatnya sangat politis.

Dalam perjalanan sejarah yang dilaluinya Muhammadiyah juga telah membuktikan betapa politik menjadi rangkaian yang terhindarkan dalam segenap ruang gerak dan perjuangan Muhammadiyah baik interen maupun eksteren yaitu yang berhubungan dengan perjuangan bangsa hingga detik ini. Berbagai peran sudah di mainkan oleh Muhammadiyah dalam konteks politik ini.

Ada tiga pola hubungan yang mempertegas wajah politik Muhammadiyah dari awal berdiri hingga saat ini yaitu Pola Hubungan Formal, personal dan netral. Ketiga pola hubungan ini secara silih berganti dilakukan oleh Muhammadiyah, namun apapun itu Khittah Politik Muhammadiyah tahun 1971 lah akhirnya yang menjadi landasan utama untuk menjalankan fungsi politik tersebut. Khittah tersebut sekali lagi menjadi menegaskan garis-garis wajah politik Muhammadiyah sampai saat ini dan

semestinya harus menjadi komitmen bagi Muhammadiyah dan para anggotanya yang secara praktis terjun ke dunia politik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fajlurrahman Jurdi. 2007. *Aib Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta : JUXTAPOSE
- Gabriel Almond . 1990. *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*, dalam Mohtar Mas`ode & Colin MacAndrews:Perbandingan Politik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Haedar Nashir. 2000. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing
- \_\_\_\_\_.2008. *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah
- Maurice Duverger. 1981. *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan* (terjemahan). Yogyakarta: Bina Aksara
- Nur Achmad dan Pramono U Tanthowi. 2000. *Muhammadiyah “ Digugat ” Reposisi Di Tengah Indonesia Yang Berubah*. Jakarta : Kompas
- Sudarno Shabron. 2003. *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta : Muhammadiyah University Press. UMS
- Suwarno. 2001. *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. Jogjakarta: UII Press